



STUDI KORELASI ANTARA IDENTITAS SOSIAL DENGAN ORIENTASI DOMINASI SOSIAL PADA APARAT HANKAMNAS DI JAWA TENGAH

Dwi Budiarto^{1✉}, Nuke Martiarini²

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Mei 2015
Disetujui Juni 2015
Dipublikasikan Juli 2015

Keywords:

Social Identity, Social Dominance Orientation, Hankamnas Forces

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara identitas sosial dengan orientasi dominasi sosial pada aparat Hankamnas di Jawa Tengah. Orientasi dominasi sosial dalam penelitian ini merujuk pada mekanisme pemeliharaan orientasi dominasi sosial guna mempertahankan posisi dominan kelompok. Sedangkan identitas sosial dalam penelitian ini berkaitan dengan institusi atau lembaga yang menaungi aparat Hankamnas, yaitu Kopassus yang merupakan perwakilan dari TNI dan Brimob yang merupakan Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi positif antara identitas sosial dengan orientasi dominasi sosial pada aparat Hankamnas, Kopassus dan Brimob. Dengan demikian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya orientasi dominasi sosial pada aparat Hankamnas, dalam hal ini Kopassus dan Brimob tidak bisa dijelaskan dengan tingkatan identitas sosial mereka sebagai bagian dari anggota kelompok institusinya masing-masing. Diprediksi terdapat faktor lain yang berkorelasi positif dengan orientasi dominasi sosial pada aparat Hankamnas di Jawa Tengah.

Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationship between Social Identity (X) with Social Dominance Orientation (Y) at aparat Hankamnas (TNI and Kopassus) in Central Java. This study is a quantitative correlation. The result of this research indicates that there is a positive correlation between social identity with social dominance orientation on Hankamnas forces (Kopassus and Brimob). This study was concluded that the social dominance orientation on Hankamnas forces, in this case Kopassus and Brimob can not be explained by the level of their social identity as part of the group members of each institution. It can be predicted that there are other factors that correlated positively with social dominance orientation on Hankamnas forces in Central Java.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara memiliki lembaga yang bertugas menjaga keutuhan bangsa dari segala macam ancaman baik yang berasal dari dalam ataupun luar negara. Lembaga yang memiliki fungsi menjalankan tugas tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Lembaga Ketahanan Negara dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Lembaga Keamanan Negara.

Sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dan kewajiban yang saling bersinggungan, tidak jarang kesatuan-kesatuan dalam tubuh TNI dan Polri terlibat perselisihan yang berujung pada konflik saat menjalankan tugasnya. Kesatuan yang dimaksud adalah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada TNI dan Brigade Mobile (Brimob) pada Polri. Berdasarkan data Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad, konflik TNI-Polri pada 2014 tercatat terjadi sebanyak delapan kali. Bila dihitung dalam kurun 1999-2014, jumlah insiden hampir mencapai 200 kasus dengan korban tewas sebanyak 20 orang (www.bbc.co.uk diakses pada 08 November 2014).

Apabila ditelaah lebih dalam, konflik berkembang karena adanya pemikiran dari masing-masing lembaga pasca pemisahan. Polri berupaya untuk memantapkan kedudukannya pasca pemisahan terkait dengan beberapa alasan diantaranya adalah pengangkatan pimpinan Kepolisian, kebutuhan akan dukungan kekuasaan serta membangun keseimbangan kekuatan khususnya tekanan dari pihak militer pada kekuasaan. Sedangkan upaya yang dilakukan Tni sebagai pihak militer untuk mengkooptasi dan mensub-ordinat

Polri sebagai lembaga kepolisian dilakukan karena tiga alasan, yaitu permintaan eksekutif untuk membantu lembaga kepolisian dalam memerangi kejahatan, sentimen kelembagaan karena pasca pemisahan kepolisian memiliki tingkat kesejahteraan dan kemampuan administrator yang lebih baik akan tetapi operasional Kepolisian pasca pemisahan dianggap masih belum baik (Muradi, 2009: 7).

Sampai saat ini belum ada penelitian yang secara eksplisit menjelaskan konflik yang terjadi antara TNI dan Polri khususnya Kopassus dan Brimob, namun konflik antara dua institusi tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait konflik antara dua kelompok dengan berlatar belakang isu politik. Bornstein (2003) dalam penelitiannya mengenai konflik antarkelompok, menjelaskan bahwa konflik antar kelompok pada umumnya melibatkan persaingan kepentingan antar kelompok. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Gould (dalam Bornstein, 2003: 129) mengungkapkan bahwa isu penting dalam konflik antarkelompok bukan pada bagaimana kelompok mengatasi masalah internal yang menghalangi tindakan kelompok, melainkan mengapa anggota kelompok sosial yang berbeda menilai kepentingan kelompok mereka sebagai pemicu utama munculnya konflik.

Penelitian-penelitian diatas menunjukkan besarnya usaha yang dilakukan dua kelompok yang berkonflik guna menjaga posisi dominannya. Hal ini pula yang terjadi antara Kopassus dan Brimob. Fakta tersebut mencerminkan tingginya orientasi dominasi sosial pada dua kelompok tersebut. Orientasi dominasi sosial mengacu pada sejauh

mana individu menerima hierarki sosial. Orientasi dominasi sosial merupakan tingkatan sejauh mana individu menganut ideologi yang mempertahankan atau memperkuat hierarki (Sidanius & Pratto, 1999: 48).

Manusia memiliki predisposisi dasar untuk membentuk hierarki dalam masyarakat (Sidanius & Pratto, 1999:3). Setiap individu anggota masyarakat diatur sedemikian rupa agar memiliki kedudukan yang berbeda didalam hierarki. Hierarki tersebut dapat berdasarkan kelompok sosial atau berdasarkan karakteristik individu.

Mekanisme pemeliharaan hierarki sosial yang dilakukan oleh anggota kelompok mencerminkan adanya orientasi dominasi sosial dalam individu tersebut. Orientasi Dominasi Sosial (ODS) menurut Sidanius & Pratto (1999: 48) adalah derajat sejauh mana individu menginginkan dan mendukung hierarki sosial berdasarkan kelompok, serta dominasi sosial dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinat. Menurut Sidanius & Pratto (1999: 49), faktor-faktor yang mempengaruhi ODS adalah keanggotaan dan identifikasi individu terhadap kelompok, latar belakang dan sosialisasi, predisposisi-kepribadian, serta identifikasi gender.

Adapun identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok bersama signifikansi nilai dan emosional dari kelompok tersebut (Tajfel, 1982: 24).

METODE

Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah 130 orang yang terdiri dari 66 orang anggota Kopassus dan 64 orang anggota Brimob.

Dalam penelitian ini, digunakan dua skala untuk mengukur variabel penelitian yaitu skala orientasi dominasi sosial dan skala identitas sosial. Orientasi Dominasi Sosial menggunakan replikasi SDO₆ *Scale* yang memiliki 16 item pertanyaan dengan cara melakukan terjemahan tanpa mengubah jumlah aitem, rentang skor serta materi skala. Dari 16 item tersebut, 8 item mengukur dimensi mendukung hierarki sosial dan 8 item mengukur dimensi mendukung kesetaraan. Identitas Sosial diukur menggunakan skala identitas sosial berdasarkan empat aspek yaitu persepsi dalam konteks antar kelompok, daya tarik *ingroup*, keyakinan saling terkait dan depersonalisasi. Jumlah item skala identitas sosial sebelum *tryout* adalah 25 butir, setelah dilakukan *tryout* jumlah item yang valid berjumlah 21 butir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum orientasi dominasi sosial disusun berdasarkan analisis statistik deskriptif terhadap skor total skala orientasi dominasi sosial yang telah dilengkapi oleh subjek. Gambaran orientasi dominasi sosial subjek berupa pencarian skor rata-rata, skor tertinggi dan terendah, yang terangkum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Gambaran Umum Orientasi Dominasi Sosial

Interval			Kriteria	Hankamnas		Kopassus		Brimob	
				Frek	%	Frek	%	Frek	%
80	$\leq X$		Tinggi	0	0	0	0 %	0	0
48	$\leq X <$	80	Sedang	97	74,62	46	69,7	51	79,69
	$X <$	48	Rendah	33	25,38	20	30,3	13	20,31
Jumlah				130	100	66	100	64	100

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa tingkatan orientasi dominasi sosial baik pada kelompok Hankamnas, Kopassus ataupun Brimob dalam kategori sedang. Sebanyak 74,62 % Hankamnas dengan mean empiris

Gambaran spesifik orientasi dominasi sosial dalam tiap dimensi pada kelompok Hankamnas, Kopassus dan

53,800 dan 69,37% Kopassus dengan mean empiris 51,758 serta 79,69% Brimob dengan mean empiris 51, 758 berada pada kategori sedang ($48 \leq X < 80$).

Brimob dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7 Ringkasan Deskriptif Orientasi Dominasi Sosial

No	Kelompok	Kategori	Dimensi	
			Mendukung Hierarki	Mendukung Kesetaraan
1.	Hankamnas	Tinggi	31,54 %	0,77 %
		Sedang	64,62 %	21,54 %
		Rendah	3,85 %	77,69 %
2.	Kopassus	Tinggi	18,18 %	1,52 %
		Sedang	75,76 %	22,73 %
		Rendah	6,06 %	75,75 %
3.	Brimob	Tinggi	45,31 %	0 %
		Sedang	54,69 %	20,31 %
		Rendah	0 %	79,69 %

Dari tabel diatas diketahui bahwa presentase terbesar dimensi mendukung hierarki sosial kategori tinggi terdapat pada kelompok Brimob (45,31%) sedangkan presentase terbesar dimensi mendukung kesetaraan kategori tinggi terdapat pada kelompok Kopassus (1,52%). Hal ini berarti bahwa presentase

orientasi dominasi sosial pada Brimob merupakan presentase paling besar jika dibandingkan dengan kelompok Hankamnas (keseluruhan) dan Brimob.

Sedangkan gambaran umum identitas sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3 Gambaran identitas sosial

Interval		Kriteria	Hankamnas		Kopassus		Brimob	
			Frek	%	Frek	%	Frek	%
105	$\leq X$	Tinggi	87	66,92	30	45,45	57	89,06
63	$\leq X <$	Sedang	43	33,08	36	54,55	7	10,94
	$X <$	Rendah	0	0	0	0	0	0
Jumlah			130	100	66	100	64	100

Tabel diatas menunjukkan kategori identitas sosial mayoritas kelompok subjek adalah tinggi (66,92%), sedangkan Kopassus termasuk kategori sedang (54,55%) dan Brimob berkategori tinggi (89,06%). Uraian diatas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan aparat Hankamnas dan Brimob

memiliki tingkat identitas sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok Kopassus.

Secara lebih spesifik, gambaran pada tiap dimensi identitas sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4 Ringkasan Deskriptif Identitas Sosial

No	Kelompok	Kategori	Dimensi			
			Persepsi dalam konteks antar kelompok	Daya tarik <i>ingroup</i>	Keyakinan saling terkait	Depersonalisasi
1.	Hankamnas	Tinggi	69,23 %	48,46 %	45,38 %	90,77 %
		Sedang	28,46 %	41,54 %	52,31 %	9,23 %
		Rendah	2,31 %	10 %	2,31 %	0 %
2.	Kopassus	Tinggi	50 %	24,24 %	25,76 %	84,85 %
		Sedang	46,97 %	59,10 %	69,70 %	15,15 %
		Rendah	3,03 %	16,66 %	4,54 %	0 %
3.	Brimob	Tinggi	89,06 %	73,44 %	65,63 %	96,88 %
		Sedang	9,38 %	23,44 %	34,37 %	3,12 %
		Rendah	1,56 %	3,12 %	0 %	0 %

Dari tabel diatas, diketahui bahwa dimensi keyakinan saling terkait memiliki persentase terbesar dibanding tiga dimensi yang lain, hal ini berarti bahwa keyakinan saling terkait mempunyai korelasi paling besar dalam menentukan tinggi rendahnya kategori identitas sosial. Dimana pada dimensi tersebut,

Brimob memiliki presentase terbesar pada kategori tinggi dengan jumlah 65,63%.

Untuk melihat ada tidaknya korelasi positif antara identitas sosial dengan orientasi dominasi sosial pada aparat Hankamnas, Kopassus dan Brimob peneliti menggunakan uji Spearman yang hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5 Ringkasan Analisis Korelasi Identitas Sosial dan Orientasi Dominasi Sosial

No	Kelompok Subjek	Koefisien Korelasi	Signifikansi
1.	Keseluruhan	0,124	0,161
2.	Kopassus	0,207	0,095
3.	Brimob	-,201	0,111

Berdasarkan tabel hasil analisis korelasi diatas, diketahui bahwa koefisien korelasi (r) pada kelompok subjek Hankamnas, Kopassus dan Brimob memiliki nilai sebesar 0,124, 0,207 dan -,201 dengan signifikansi (p) > 0,05 (TS = 5%) yang berarti tidak terdapat korelasi antara identitas sosial dan orientasi dominasi sosial pada kelompok subjek Hankamnas, Kopassus dan Brimob.

Guna melakukan eksplorasi lebih dalam mengenai penyebab tidak adanya

korelasi antara identitas sosial dengan orientasi dominasi sosial, peneliti melakukan uji tambahan berupa uji beda menggunakan T-test pada masing-masing variabel. Hasilnya terdapat perbedaan orientasi dominasi sosial antara aparat Hankamnas. Perbedaan orientasi dominasi sosial antar aparat Hankamnas dimana kelompok subjek Kopassus memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok subjek Brimob. Adapun identitas sosial pada kelompok subjek Kopassus lebih

rendah dari identitas sosial kelompok subjek Brimob.

Aparat Hankamnas, baik pada Kopassus maupun Brimob memiliki orientasi dominasi sosial pada tingkatan sedang. Orientasi dominasi sosial Kopassus dan Brimob pada tingkatan sedang menempatkan kelompok Hankamnas pada posisi dominan dalam sistem hierarki sosial. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya aparat Hankamnas memang disiapkan dan difasilitasi oleh pemerintah agar memiliki kemampuan pengendalian terhadap situasi tertentu dalam masyarakat. Kemampuan pengendalian terhadap masyarakat inilah yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk orientasi dominasi sosial. Selain itu, melihat TNI dan Polri yang menjadi induk dari Kopassus dan Brimob terdapat sejarah yang mampu menjelaskan munculnya orientasi dominasi sosial pada dua lembaga tersebut.

Diketahui bahwa sejak terbentuk hingga tahun 1999, TNI dan Polri tergabung dalam sebuah institusi bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dimana pada masa itu, TNI lebih cenderung dominan dalam kehidupan bernegara dari pada Polri. Hal ini dibuktikan dari peran aktif pejabat TNI dalam kehidupan politik sebagai anggota DPR, sehingga TNI lebih bersifat multi fungsi dan menguasai berbagai bidang kenegaraan yang strategis jika dibandingkan dengan Polri. Namun, semenjak adanya pemisahan antara TNI dan Polri pada tahun 1999, Polri mulai berusaha mensejajarkan posisinya dengan TNI di mata negara terkait kepemimpinan, kekuatan dan kekuasaan. Sedangkan pada tubuh TNI, terjadi sentimen politik, karena pasca pemisahan Polri dari TNI dalam ABRI TNI merasa bahwa Polri memperoleh kesejahteraan yang lebih baik daripada Polri. Persepsi inilah yang menjadi salah satu pemicu konflik antara Kopassus dan Brimob sebagai bentuk pemeliharaan posisi dominan dalam sistem hierarki yang menjadi bukti adanya orientasi dominasi sosial pada dua institusi tersebut.

Konsep orientasi dominasi sosial dari Sidanius dan Pratto (1999) menyebutkan bahwa selain identitas sosial, terdapat tiga faktor lain yang memiliki korelasi dengan orientasi dominasi sosial. Tiga faktor tersebut antara lain yang pertama adalah latar belakang dan sosialisasi yang dialami oleh individu seperti tingkat pendidikan, ideologi dan keyakinan agama. Faktor kedua adalah predisposisi, kepribadian dan tempramen individu, misalnya individu dengan empati yang tinggi akan cenderung memiliki orientasi dominasi sosial yang rendah. Faktor berikutnya adalah identifikasi gender individu dimana laki-laki lebih cenderung memiliki orientasi dominasi sosial yang tinggi dibandingkan perempuan dan faktor terakhir adalah perubahan kesenjangan kedudukan sosial (*social gap*) antara kelompok dominan dan subordinat dalam hierarki sosial yang bersifat arbitrer.

Adanya faktor lain yang berkorelasi dengan orientasi dominasi sosial seperti yang telah disebutkan diatas menjelaskan bahwa merupakan hal yang wajar apabila dalam penelitian ini, keseluruhan hipotesis kerja yang diajukan oleh peneliti yang intinya menekankan korelasi positif antara identitas sosial dan orientasi dominasi sosial pada akhirnya ditolak. Tidak diterimanya hipotesis penelitian, disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah individu. Individu merupakan makhluk yang dinamis, yang artinya selalu berusaha untuk beradaptasi sesuai dengan lingkungannya, begitupun dengan identitas sosial dan orientasi dominasi sosial yang dimiliki oleh individu tersebut.

Hasil analisis data pada uji beda menunjukkan adanya perbedaan orientasi dominasi sosial antara kelompok subjek aparat Hankamnas. Perbedaan tersebut terlihat dari selisih rata-rata yang didapat antara kelompok subjek Aparat Hankamnas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata orientasi dominasi sosial pada kelompok Kopassus lebih kecil dari kelompok subjek Brimob.

Tingkatan orientasi dominasi sosial pada kedua kelompok subjek berkaitan dengan pemeliharaan hierarki sosial dalam masyarakat. Sidanius dan Pratto (1999:33) bahwa hierarki sosial berdasarkan kelompok yang bersifat arbitrer memiliki konstruksi sosial yang sangat fleksibel atau dapat berubah tergantung situasi. Setidaknya terdapat tiga hal yang berkontribusi dalam pemeliharaan hierarki sosial, yaitu diskriminasi individual agregat, diskriminasi institusional agregat dan *legitimizing myths* (Sidanius & Pratto, 1999 : 39-40).

Meskipun kualitas orientasi dominasi sosial pada Aparat Hankamnas pada tingkatan sedang, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yang paling berperan dalam tinggi rendahnya orientasi dominasi sosial pada Aparat Hankamnas adalah aspek mendukung hierarki sosial. Hal ini sesuai dengan definisi dari orientasi dominasi sosial itu sendiri yang berbunyi derajat sejauh mana individu menginginkan dan mendukung hierarki sosial berdasarkan kelompok, serta dominasi sosial dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinat (Sidanius & Pratto, 1999 : 48).

Sedangkan pada identitas sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kopassus memiliki tingkat identitas sosial yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Brimob. Tingkatan identitas sosial kopassus berada pada kategori sedang sedangkan tingkatan identitas sosial brimob berada pada kategori tinggi.

Tingkatan identitas sosial Brimob pada kategori tinggi dapat dijelaskan melalui bekal legal-politik Polri berbentuk Tap MPR/VI/2000 dan Tap MPR/VII/2000. Polri menjadi lembaga profesional yang diarahkan pada tugas-tugas kemanan dalam negeri (kamdagri) sehingga mendorong munculnya reformasi pada aspek instrumental dan struktural dalam tubuh Polri. Reformasi aspek instrumental yang terjadi pada Polri ditandai dengan adanya perubahan pada doktrin yang digunakan.

Reformasi aspek Kultural Polri pasca pemisahan dari ABRI juga mendukung terbentuknya identitas sosial yang tinggi pada Brimob. Reformasi aspek kultural Polri meliputi perubahan manajemen sumber daya, manajemen operasional, dan sistem pengawasan yang bernuansa pada perubahan kultur yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan Polri secara prima kepada masyarakat.

Berbeda dengan Brimob, tingkat identitas sosial Kopasus pada kategori sedang. Kopassus sebagai bagian dari tentara nasional memiliki empat jati diri yang diprediksi memiliki korelasi dengan identitas sosial, yaitu sebagai Tentara Nasional, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. Adanya empat jati diri yang terdapat dalam diri Kopassus, menjadi penyeimbang dan pengatur identitas sosial Kopassus, sehingga tetap berada dalam tingkatan yang tidak berlebihan.

Rendahnya identitas sosial Kopassus jika dibandingkan dengan Brimob dapat pula dilihat pada sejarah TNI pasca pemisahan ABRI pada tahun 1999. Apabila Brimob mengalami reformasi pada berbagai aspek pasca pemisahan, TNI justru mengalami pembatasan pada kewenangannya. TNI yang dimasa orde baru menjalankan Dwi Fungsi TNI (politik dan militer), atau bahkan cenderung multi fungsi dituntut untuk kembali menjalankan peran dan fungsinya melalui penghapusan peran yang tidak sesuai dengan tugas pertahanan dan pengambilalihan bisnis TNI.

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengambilalihan bisnis militer memiliki kompleksitas yang tinggi. Proses pengambilalihan bisnis TNI saat ini mengalami stagnansi pada setidaknya dua dimensi, hukum dan politik. Secara hukum, belum ada peraturan presiden tentang pengambilalihan bisnis militer yang menjadi dasar dari proses pengambilalihan tersebut. Banyaknya hambatan yang muncul dalam upaya

pengembalian peran TNI sesuai dengan Undang-Undang mejadi kendala terciptanya profesionalisme TNI, sehingga berdampak pada identitas sosial pada masing-masing anggotanya.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah (1) tidak terdapat korelasi positif antara identitas sosial dengan orientasi dominasi sosial pada aparat Hankamnas di Jawa Tengah; (2) tidak terdapat korelasi positif antara identitas sosial dan orientasi dominasi sosial pada Kopassus; (3) tidak terdapat korelasi positif antara identitas sosial dan orientasi dominasi sosial pada Brimob.

Berdasarkan uji beda yang dilakukan sebagai uji tambahan, diketahui bahwa (1) terdapat perbedaan orientasi dominasi sosial antara Kopassus dan Brimob. Tingkatan orientasi dominasi sosial pada Kopassus dan Brimob berada pada kategori rendah; (2) terdapat perbedaan identitas sosial antara Kopassus dan Brimob. Tingkatan identitas sosial Kopassus berada dalam kategori sedang, sedangkan Brimob berada pada kategori tinggi; (3) Aspek yang paling berkorelasi dengan orientasi dominasi sosial pada kedua kelompok subjek adalah aspek mendukung hierarki; (4) Dimensi identitas sosial yang menyumbang nilai paling tinggi dalam munculnya identitas sosial pada kedua kelompok subjek adalah dimensi keyakinan saling terkait.

Merujuk pada simpulan penelitian, ada beberapa saran bagi peneliti Selanjutnya, diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang hendak meneliti maupun mengembangkan penelitian sejenis, peneliti menyarankan untuk memodifikasi skala orientasi dominasi sosial terkait rentang respon dan jumlah aitem yang digunakan serta mempertimbangkan faktor lain yang diprediksi berkorelasi dengan orientasi dominasi sosial seperti latar belakang individu dan sosialisasi, predisposisi, kepribadian, temperamen serta identifikasi gender yang

diprediksi memiliki korelasi dengan orientasi dominasi sosial agar mampu mengungkap lebih dalam dinamika orientasi dominasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bornstein, Gary. 2003. Intergroup Conflict: Individual, Group, Collective Interests. *Personality & Social Psychology Review* 2003, Vol. 7, No. 2, 129-151.
- Brewer, Marylin B. 2001. The Many Face of Social Identity : Implications for Political Psychology. *Political Psychology*, Vol. 22, No. 1.
- Halevy et al. 2006. Perceiving Intergroup Conflict: From Game Models to Mental Templates. *Personality & Social Psychology Bulletin*, 32:1674-1691.
- Haslam, Platow & Turner. 2001. Social Identity and the romance of leadership : The Importance of Being Seen To Be "Doing It for Us". *Journal of Group Process & Intergroup Relations*, Vol 4(3), 191-205.
- Sidanius & Pratto. 1999. Social Dominance : An Intergroup Theory of Social Hierarchy and Oppression. New York : Cambridge University Press.
- Tajfel, Henri. 1982. Social Psychology of Intergroup Relations. England : Departement of Psychology, University of Bristol.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.